



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.429, 2015

KEMEN-PUPR. Wilayah Sungai. Kriteria.
Penetapan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/PRT/M/2015

TENTANG

Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air serta sumber-sumber air;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air pengelolaan air dan/atau sumber-

sumber air sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kesatuan wilayah tata pengairan yang ditetapkan berdasarkan wilayah sungai;

- d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c, diperlukan kriteria dan penetapan wilayah sungai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN WILAYAH SUNGAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
3. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
4. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
5. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
6. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
11. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
12. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan tata pengaturan air nasional yang didasarkan atas wilayah sungai.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tata pengaturan air nasional yang baik pada setiap wilayah sungai guna mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat disegala bidang kehidupan.

Pasal 3

Tata pengaturan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan wilayah sungai.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. efektivitas pengelolaan sumber daya air dengan kriteria:
 - 1) dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - 2) telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain.
 - b. efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan kriteria rentang kendali pengelolaan sumber daya air; dan
 - c. keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai basah dan daerah aliran sungai kering dengan kriteria tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wilayah sungai lintas negara;

- b. wilayah sungai lintas provinsi;
 - c. wilayah sungai strategis nasional;
 - d. wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
 - e. wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.
- (4) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur.
- (5) Pengelolaan sumber daya air dalam satu wilayah sungai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e menjadi wewenang dan tanggung jawab bupati/walikota.
- (6) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pengelola sumber daya air berdasarkan penugasan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

Sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kriteria penetapan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. potensi sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan lebih besar atau sama dengan 20% (dua puluh persen) dari potensi sumber daya air pada provinsi;
- b. banyaknya sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai yang bersangkutan:
 - 1) jumlah sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 16 (enam belas) sektor; dan
 - 2) jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penduduk pada provinsi.

- c. besarnya dampak terhadap pembangunan nasional:
- 1) sosial:
 - a) jumlah tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tenaga kerja pada tingkat provinsi; atau
 - b) pada wilayah sungai terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain;
 - 2) lingkungan:
 - a) terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik dan langka pada sumber air yang perlu dilindungi atau yang ditetapkan dalam konvensi internasional;
 - b) perbandingan antara debit air sungai maksimum dan debit air sungai minimum rata-rata tahunan pada sungai utama melebihi 75 (tujuh puluh lima); atau
 - c) perbandingan antara kebutuhan air dan ketersediaan air andalan setiap tahun pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5 (satu koma lima).
 - 3) ekonomi:
 - a) terdapat paling sedikit 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) ha;
 - b) nilai produktif industri yang tergantung pada sumber daya air pada wilayah sungai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai produktif industri pada tingkat provinsi; atau
 - c) terdapat produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air yang terhubung dengan jaringan listrik lintas provinsi dan/atau terhubung kedalam jaringan transmisi nasional.
- d. dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kerugian ekonomi paling sedikit 1% (satu persen) dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Pasal 8

- (1) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dirinci dalam tabel yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta kodefikasi wilayah sungai seluruh Indonesia tergambar dalam peta yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta Wilayah Sungai yang tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Daerah aliran sungai yang berada pada pulau atau pulau-pulau kecil yang belum memiliki nama dan tidak tercantum dalam daftar daerah aliran sungai pada Lampiran Peta Wilayah Sungai dalam Peraturan Menteri ini, keberadaannya termasuk bagian dari Wilayah Sungai yang didasarkan pada batas Wilayah Sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang sama.

Pasal 10

Pengelolaan sumber daya air untuk pulau-pulau kecil yang tidak tercantum pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, menjadi satu kesatuan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai yang berada pada wilayah administrasi yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penetapan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, dengan tetap menjamin kebutuhan air baku bagi kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jaminan kebutuhan air baku untuk kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 12

Penetapan Wilayah Sungai dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik dan/atau nonfisik di Wilayah Sungai yang bersangkutan yang mengakibatkan perubahan batas Wilayah Sungai dan/atau perubahan kelompok Wilayah Sungai.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 04/PRT/M/2015

TANGGAL : 18 MARET 2015

TENTANG : KRITERIA DAN PENETAPAN
WILAYAH SUNGAI**Tabel 1.1 Wilayah Sungai Lintas Negara**

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Lokasi
1	03.07.A1	Benanain	Sebagaimana peta Lampiran V.76	NTT – Timor Leste
2	03.08.A1	Noelmina	Sebagaimana peta Lampiran V.77	NTT – Timor Leste
3	04.17.A1	Sesayap	Sebagaimana peta Lampiran V.94	Kalimantan Utara – Serawak (Malaysia)
4	07.04.A1	Mamberamo-Tami-Apauvar	Sebagaimana peta Lampiran V.127	Papua – Papua Nugini
5	07.05.A1	Einlanden-Digul-Bikuma	Sebagaimana peta Lampiran V.128	Papua – Papua Nugini

Tabel 1.2 Wilayah Sungai Lintas Provinsi

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	01.09.A2	Alas-Singkil	Kuala Hitam, Hitam, Anun, Singkil, Simardokar, Banyak, Tuangku, dan Bangkaru	Aceh – Sumatera Utara
2	01.18.A2	Batang Natal-Batang Batahan	Sebagaimana peta Lampiran V.18	Sumatera Utara – Sumatera Barat
3	01.23.A2	Rokan	Sebagaimana peta	Sumatera Utara – Riau – Sumatera

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
			Lampiran V.23	Barat
4	01.27.A2	Kampar	Kampar, Teluk, Upih, Teluk Beringin, Solok, Tanjung Sum, dan Teluk Dalam	Riau - Sumatera Barat
5	01.29.A2	Indragiri-Akuaman	Sebagaimana peta Lampiran V.29	Riau - Sumatera Barat
6	01.34.A2	Batanghari	Batanghari dan Air Hitam	Jambi - Sumatera Barat
7	01.35.A2	Teramang-Muar	Sebagaimana peta Lampiran V.35	Bengkulu - Jambi
8	01.39.A2	Nasal-Padang Guci	Sebagaimana peta Lampiran V.39	Bengkulu - Sumatera Selatan - Lampung
9	01.40.A2	Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	Sebagaimana peta Lampiran V.40	Sumatera Selatan - Jambi - Bengkulu - Lampung
10	01.43.A2	Mesuji-Tulang Bawang	Mesuji dan Tulang Bawang	Lampung - Sumatera Selatan
11	02.03.A2	Cidanau-Ciujung-Cidurian*	Sebagaimana peta Lampiran V.48	Banten - Jawa Barat
12	02.05.A2	Ciliwung-Cisadane *	Sebagaimana peta Lampiran V.50	DKI Jakarta - Banten - Jawa Barat
13	02.09.A2	Cimanuk-Cisanggarung	Sebagaimana peta Lampiran V.54	Jawa Barat - Jawa Tengah
14	02.10.A2	Citanduy	Sebagaimana peta Lampiran V.55	Jawa Barat - Jawa Tengah
15	02.17.A2	Progo-Opak - Serang	Opak, Progo, dan Serang	DI Yogyakarta - Jawa Tengah

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
16	02.18.A2	Bengawan Solo	Sebagaimana peta Lampiran V.63	Jawa Timur – Jawa Tengah
17	04.05.A2	Jelai-Kendawangan	Sebagaimana peta Lampiran V.82	Kalimantan Tengah – Kalimantan Barat
18	04.09.A2	Barito	Sebagaimana peta Lampiran V.86	Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan
19	04.13.A2	Mahakam	Sebagaimana peta Lampiran V.90	Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
20	04.15.A2	Berau-Kelai	Sebagaimana peta Lampiran V.92	Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
21	05.03.A2	Dumoga-Sangkub	Sebagaimana peta Lampiran V.97	Sulawesi Utara – Gorontalo
22	05.04.A2	Limboto-Bolango-Bone	Sebagaimana peta Lampiran V.98	Gorontalo – Sulawesi Utara
23	05.06.A2	Randangan	Sebagaimana peta Lampiran V.100	Gorontalo – Sulawesi Tengah
24	05.08.A2	Palu-Lariang	Sebagaimana peta Lampiran V.102	Sulawesi Tengah – Sulawesi Barat – Sulawesi Selatan
25	05.09.A2	Parigi-Poso	Sebagaimana peta Lampiran V.103	Sulawesi Tengah – Sulawesi Selatan
26	05.13.A2	Kalukku-Karama	Sebagaimana peta Lampiran V.107	Sulawesi Barat – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tengah
27	05.14.A2	Pompengan-Larona	Sebagaimana peta Lampiran V.108	Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara
28	05.15.A2	Saddang	Sebagaimana peta Lampiran V.109	Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat
29	05.18.A2	Towari-Lasusua	Sebagaimana peta Lampiran V.112	Sulawesi Tenggara – Sulawesi Selatan
30	05.19.A2	Lasolo-Konaweha	Sebagaimana peta Lampiran V.113	Sulawesi Tenggara – Sulawesi Tengah

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
31	07.02.A2	Omba	Sebagaimana peta Lampiran V.125	Papua Barat - Papua

Keterangan:

* : Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1.3 Wilayah Sungai Strategis Nasional

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	01.01.A3	Aceh-Meureudu	Sebagaimana peta Lampiran V.1	Aceh
2	01.04.A3	Woyla-Bateue	Sebagaimana peta Lampiran V.4	Aceh
3	01.05.A3	Jambo Aye	Sebagaimana peta Lampiran V.5	Aceh
4	01.11.A3	Belawan-Ular-Padang	Sebagaimana peta Lampiran V.11	Sumatera Utara
5	01.13.A3	Toba-Asahan	Toba-Asahan	Sumatera Utara
6	01.25.A3	Siak	Sebagaimana peta Lampiran V.25	Riau
7	01.32.A3	Kepulauan Riau	Sebagaimana peta Lampiran V.32	Kepulauan Riau
8	01.41.A3	Bangka	Sebagaimana peta Lampiran V.41	Bangka Belitung
9	01.45.A3	Seputih-Sekampung	Sebagaimana peta Lampiran V.45	Lampung
10	02.06.A3	Citarum *	Sebagaimana peta Lampiran V.51	Jawa Barat

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
11	02.10.A3	Serayu-Bogowonto	Sebagaimana peta Lampiran V.57	Jawa Tengah
12	02.14.A3	Jratunseluna	Sebagaimana peta Lampiran V.61	Jawa Tengah
13	02.17.A3	Brantas	Sebagaimana peta Lampiran V.64	Jawa Timur
14	03.01.A3	Bali-Penida	Sebagaimana peta Lampiran V.70	Bali
15	03.02.A3	Lombok	Sebagaimana peta Lampiran V.71	Nusa Tenggara Barat
16	03.03.A3	Sumbawa	Sebagaimana peta Lampiran V.72	Nusa Tenggara Barat
17	03.05.A3	Flores	Sebagaimana peta Lampiran V.74	Nusa Tenggara Timur
18	04.03.A3	Kapuas	Sebagaimana peta Lampiran V.80	Kalimantan Barat
19	04.07.A3	Mentaya-Katingan	Mentaya dan Katingan	Kalimantan Tengah
20	05.01.A3	Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas	Sebagaimana peta Lampiran V.95	Sulawesi Utara
21	05.05.A3	Paguyaman	Sebagaimana peta Lampiran V.99	Gorontalo
22	05.16.A3	Walanae-Cenranae	Sebagaimana peta Lampiran V.110	Sulawesi Selatan
23	05.17.A3	Jeneberang	Sebagaimana peta Lampiran V.111	Sulawesi Selatan
24	06.01.A3	Halmahera Utara	Sebagaimana peta Lampiran V.117	Maluku Utara
25	06.02.A3	Halmahera Selatan	Sebagaimana peta Lampiran V.118	Maluku Utara
26	06.05.A3	Ambon-Seram	Sebagaimana peta	Maluku

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
			Lampiran V.121	
27	06.07.A3	Kepulauan Yamdena-Wetar	Sebagaimana peta Lampiran V.123	Maluku
28	07.01.A3	Kamundan-Sebyar	Sebagaimana peta Lampiran V.124	Papua Barat

Keterangan:

* : Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1.4 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	01.02.B	Teunom-Lambeuso	Sebagaimana peta Lampiran V.2	Aceh
2	01.03.B	Pase-Peusangan	Pandrah, Nalon, Peudada, Ihong, Peusangan, Tuam, Buluh, Pase, Penggaraman, dan Bukit	Aceh
3	01.06.B	Tamiang-Langsa	Sebagaimana peta Lampiran V.6	Aceh
4	01.07.B	Baru-Kluet	Sebagaimana peta Lampiran V.7	Aceh
5	01.10.B	Wampu-Besitang	Sebagaimana peta Lampiran V.10	Sumatera Utara
6	01.12.B	Bah Bolon	Sipare-pare, Bolon, Perupuk, Kiri, dan Silau Bonto	Sumatera Utara
7	01.14.B	Nias	Sebagaimana peta Lampiran V.14)	Sumatera Utara
8	01.15.B	Sibundong-Batang Toru	Sebagaimana peta Lampiran V.15	Sumatera Utara

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
9	01.16.B	Barumun-Kualuh	Panai dan Aek Barumun	Sumatera Utara
10	01.17.B	Batang Angkola-Batang Gadis	Toru, Nagor, Batang Singkuang, Batang Gadis, dan Tabuyung	Sumatera Utara
11	01.19.B	Masang-Pasaman	Bangis, Sikilang, Maligi, Pasaman, Ampu, Simpang, Palembang, dan Masang	Sumatera Barat
12	01.21.B	Silaut-Tarusan	Sebagaimana peta Lampiran V.21	Sumatera Barat
13	01.30.B	Reteh	Apung	Riau
14	01.31.B	Bengkalis-Meranti	Sebagaimana peta Lampiran V.31	Riau
15	01.33.B	Pengabuan-Lagan	Pengabuan, Betara, Pangkal Duri, Mandahara, dan Lagan	Jambi
16	01.36.B	Sebelat-Ketahun-Lais	Sebagaimana peta Lampiran V.36	Bengkulu
17	01.37.B	Bengkulu-Alas-Talo	Bengkulu, Jenggalu, Nelas, Kungkai, Seluma, Penago, Talo, Alas, dan Maras	Bengkulu
18	01.42.B	Belitung	Sebagaimana peta Lampiran V.42	Bangka Belitung
19	01.44.B	Semangka	Sebagaimana peta Lampiran V.44	Lampung
20	02.01.B	Cibaliung-Cisawarna	Sebagaimana peta Lampiran V.46	Banten
21	02.02.B	Ciliman-Cibungur	Sebagaimana peta Lampiran V.47	Banten

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
22	02.05.B	Cisadea-Cibareno	Sebagaimana peta Lampiran V.52	Jawa Barat
23	02.06.B	Ciwulan-Cilaki	Sebagaimana peta Lampiran V.53	Jawa Barat
24	02.09.B	Pemali-Comal	Sebagaimana peta Lampiran V.56	Jawa Tengah
25	02.11.B	Bodri-Kuto	Sebagaimana peta Lampiran V.58	Jawa Tengah
26	02.18.B	Madura-Bawean	Sebagaimana peta Lampiran V.65	Jawa Timur
27	02.19.B	Welang-Rejoso	Sebagaimana peta Lampiran V.66	Jawa Timur
28	02.20.B	Bondoyudo-Bedadung	Sebagaimana peta Lampiran V.67	Jawa Timur
29	02.21.B	Pekalen-Sampean	Sebagaimana peta Lampiran V.68	Jawa Timur
30	02.22.B	Baru-Bajulmati	Sebagaimana peta Lampiran V.69	Jawa Timur
31	03.04.B	Sumba	Sebagaimana peta Lampiran V.73	Nusa Tenggara Timur
32	03.06.B	Flotim Kep-Lembata-Alor	Sebagaimana peta Lampiran V.75	Nusa Tenggara Timur
33	04.01.B	Sambas	Polah, Sambas, Sebangkau, dan Selakau	Kalimantan Barat
34	04.02.B	Mempawah	Raya, Duri, Mempawah, Karimunting, dan Lemukutan	Kalimantan Barat
35	04.04.B	Pawan	Semadang, Semanai, Siduk, Tolak, Pawan, dan Pesaguan	Kalimantan Barat
36	04.06.B	Seruyan	Perlu, Segitung, dan Seruyan	Kalimantan Tengah
37	04.08.B	Kahayan	Sebangan dan Kahayan	Kalimantan Tengah

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
38	04.10.B	Cengal-Batulicin	Sebagaimana peta Lampiran V.87	Kalimantan Selatan
39	04.14.B	Karangan	Sebagaimana peta Lampiran V.91	Kalimantan Timur
40	04.16.B	Kayan	Kayan	Kalimantan Utara
41	05.02.B	Poigar-Ranoyapo	Sebagaimana peta Lampiran V.96	Sulawesi Utara
42	05.07.B	Lambunu-Buol	Sebagaimana peta Lampiran V.101	Sulawesi Tengah
43	05.10.B	Bongka-Mentawa	Sebagaimana peta Lampiran V.104	Sulawesi Tengah
44	05.11.B	Kepulauan Banggai	Sebagaimana peta Lampiran V.105	Sulawesi Tengah
45	05.12.B	Laa-Tambalako	Sebagaimana peta Lampiran V.106	Sulawesi Tengah
46	05.20.B	Poleang-Roraya	Sebagaimana peta Lampiran V.114	Sulawesi Tenggara
47	05.21.B	Muna	Sebagaimana peta Lampiran V.115	Sulawesi Tenggara
48	05.22.B	Buton	Sebagaimana peta Lampiran V.116	Sulawesi Tenggara
49	06.03.B	Kepulauan Sula-Obi	Sebagaimana peta Lampiran V.119	Maluku Utara
50	06.04.B	Buru	Sebagaimana peta Lampiran V.120	Maluku
51	06.06.B	Kepulauan Kei-Aru	Sebagaimana peta Lampiran V.122	Maluku
52	07.03.B	Wapoga-Mimika	Sebagaimana peta Lampiran V.126	Papua

Tabel 1.5 Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	01.08.C	Simeulue	Sebagaimana peta Lampiran V.8	Aceh	Simeuleu
2	01.20.C	Siberut-Pagai-Sipora	Sebagaimana peta Lampiran V.20	Sumatera Barat	Mentawai
3	01.22.C	Kubu	Paripahan, Pasir Limau Kapas, Pasir Limau, Sungai Daun, Teluk Piayai, Kubu, Bangko, dan Alang Besar	Riau	Rokan Hilir
4	01.24.C	Bukit Batu	Sepahat dan Bukit Batu	Riau	Bengkalis
5	01.26.C	Rawa	Rawa, Metas, Mungkal, Belat, Lakar, dan Kimas	Riau	Siak
6	01.28.C	Guntung-Kateman	Danai, Kateman, Burung, dan Busung	Riau	Indragiri Hilir
7	01.38.C	Enggano	Mae, Tanjung Kooma, Tanjung Lakoaha, Mahame, Kokodo, Malakoni, Belowa, Kijah, Taobi, dan Dua	Bengkulu	Bengkulu Utara
8	02.04.C *	Kepulauan Seribu	Sebagaimana peta Lampiran V.49	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten/Kota
9	02.12.C	Kepulauan Karimunjawa	Sebagaimana peta Lampiran V.59	Jawa Tengah	Jejara
10	02.13.C	Wiso-Gelis	Sebagaimana peta Lampiran V.60	Jawa Tengah	Jejara
11	04.12.C	Pulau Laut	Sebagaimana peta Lampiran V.88	Kalimantan Selatan	Kota Baru

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten/Kota
12	04.12.C	Kendilo	Sebagaimana peta Lampiran V.89	Kalimantan Timur	Paser

Keterangan:

* : Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administrasi yang dikelola oleh Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut menjadi Kewenangan Prov. DKI Jakarta

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Tabel 1.1 Wilayah Sungai Lintas Negara

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Lokasi
1	03.07.A1	Benanain	Sebagaimana peta Lampiran V.76	NTT – Timor Leste
2	03.08.A1	Noelmina	Sebagaimana peta Lampiran V.77	NTT – Timor Leste
3	04.17.A1	Sesayap	Sebagaimana peta Lampiran V.94	Kalimantan Utara – Serawak (Malaysia)
4	07.04.A1	Mamberamo-Tami-Apauvar	Sebagaimana peta Lampiran V.127	Papua – Papua Nugini
5	07.05.A1	Einlanden-Digul-Bikuma	Sebagaimana peta Lampiran V.128	Papua – Papua Nugini

Tabel 1.2 Wilayah Sungai Lintas Provinsi

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	01.09.A2	Alas-Singkil	Kuala Hitam, Hitam, Anun, Singkil, Simardokar, Banyak, Tuangku, dan Bangkaru	Aceh – Sumatera Utara
2	01.18.A2	Batang Natal-Batang Batahan	Sebagaimana peta Lampiran V.18	Sumatera Utara – Sumatera Barat
3	01.23.A2	Rokan	Sebagaimana peta Lampiran V.23	Sumatera Utara – Riau – Sumatera Barat
4	01.27.A2	Kampar	Kampar, Teluk, Upih, Teluk Beringin, Solok, Tanjung Sum, dan Teluk Dalam	Riau – Sumatera Barat
5	01.29.A2	Indragiri-Akuaman	Sebagaimana peta Lampiran V.29	Riau – Sumatera Barat

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
6	01.34.A2	Batanghari	Batanghari dan Air Hitam	Jambi – Sumatera Barat
7	01.35.A2	Teramang-Muar	Sebagaimana peta Lampiran V.35	Bengkulu – Jambi
8	01.39.A2	Nasal-Padang Guci	Sebagaimana peta Lampiran V.39	Bengkulu – Sumatera Selatan – Lampung
9	01.40.A2	Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau	Sebagaimana peta Lampiran V.40	Sumatera Selatan – Jambi – Bengkulu – Lampung
10	01.43.A2	Mesuji-Tulang Bawang	Mesuji dan Tulang Bawang	Lampung – Sumatera Selatan
11	02.03.A2	Cidanau-Ciujung-Cidurian*	Sebagaimana peta Lampiran V.48	Banten – Jawa Barat
12	02.04.A2	Kepulauan Seribu	Sebagaimana peta Lampiran V.49	DKI Jakarta – Banten
13	02.05.A2	Ciliwung-Cisadane *	Sebagaimana peta Lampiran V.50	DKI Jakarta – Banten – Jawa Barat
14	02.09.A2	Cimanuk-Cisanggarung	Sebagaimana peta Lampiran V.54	Jawa Barat – Jawa Tengah
15	02.10.A2	Citanduy	Sebagaimana peta Lampiran V.55	Jawa Barat – Jawa Tengah
16	02.17.A2	Progo-Opak - Serang	Opak, Progo, dan Serang	DI Yogyakarta – Jawa Tengah
17	02.18.A2	Bengawan Solo	Sebagaimana peta Lampiran V.63	Jawa Timur – Jawa Tengah
18	04.05.A2	Jelai-Kendawangan	Sebagaimana peta Lampiran V.82	Kalimantan Tengah – Kalimantan Barat
19	04.09.A2	Barito	Sebagaimana peta Lampiran V.86	Kalimantan Tengah –

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
				Kalimantan Selatan
20	04.14.A2	Mahakam	Sebagaimana peta Lampiran V.90	Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
21	04.15.A2	Berau-Kelai	Sebagaimana peta Lampiran V.92	Kalimantan Timur – Kalimantan Utara
22	05.03.A2	Dumoga-Sangkub	Sebagaimana peta Lampiran V.97	Sulawesi Utara – Gorontalo
23	05.04.A2	Limboto-Bolango-Bone	Sebagaimana peta Lampiran V.98	Gorontalo – Sulawesi Utara
24	05.06.A2	Randangan	Sebagaimana peta Lampiran V.100	Gorontalo – Sulawesi Tengah
25	05.08.A2	Palu-Lariang	Sebagaimana peta Lampiran V.102	Sulawesi Tengah – Sulawesi Barat – Sulawesi Selatan
26	05.09.A2	Parigi-Poso	Sebagaimana peta Lampiran V.103	Sulawesi Tengah – Sulawesi Selatan
27	05.13.A2	Kalukku-Karama	Sebagaimana peta Lampiran V.107	Sulawesi Barat – Sulawesi Selatan – Sulawesi Tengah
28	05.14.A2	Pompengan-Larona	Sebagaimana peta Lampiran V.108	Sulawesi Selatan – Sulawesi Tenggara
29	05.15.A2	Saddang	Sebagaimana peta Lampiran V.109	Sulawesi Selatan – Sulawesi Barat
30	05.18.A2	Towari-Lasusua	Sebagaimana peta Lampiran V.112	Sulawesi Tenggara – Sulawesi Selatan
31	05.19.A2	Lasolo-Konaweha	Sebagaimana peta Lampiran V.113	Sulawesi Tenggara – Sulawesi Tengah
32	07.02.A2	Omba	Sebagaimana peta Lampiran V.125	Papua Barat – Papua

Keterangan:

* : Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1.3 Wilayah Sungai Strategis Nasional

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	01.01.A3	Aceh-Meureudu	Sebagaimana peta Lampiran V.1	Aceh
2	01.04.A3	Woyla-Bateue	Sebagaimana peta Lampiran V.4	Aceh
3	01.05.A3	Jambo Aye	Sebagaimana peta Lampiran V.5	Aceh
4	01.11.A3	Belawan-Ular-Padang	Sebagaimana peta Lampiran V.11	Sumatera Utara
5	01.13.A3	Toba-Asahan	Toba-Asahan	Sumatera Utara
6	01.25.A3	Siak	Sebagaimana peta Lampiran V.25	Riau
7	01.41.A3	Bangka	Sebagaimana peta Lampiran V.41	Bangka Belitung
8	01.45.A3	Seputih-Sekampung	Sebagaimana peta Lampiran V.45	Lampung
9	02.06.A3	Citarum *	Sebagaimana peta Lampiran V.51	Jawa Barat
10	02.10.A3	Serayu-Bogowonto	Sebagaimana peta Lampiran V.57	Jawa Tengah
11	02.14.A3	Jratunseluna	Sebagaimana peta Lampiran V.61	Jawa Tengah
12	02.17.A3	Brantas	Sebagaimana peta Lampiran V.64	Jawa Timur
13	03.01.A3	Bali-Penida	Sebagaimana peta Lampiran V.70	Bali
14	03.02.A3	Lombok	Sebagaimana peta Lampiran V.71	Nusa Tenggara Barat

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
15	03.03.A3	Sumbawa	Sebagaimana peta Lampiran V.72	Nusa Tenggara Barat
16	03.05.A3	Flores	Sebagaimana peta Lampiran V.74	Nusa Tenggara Timur
17	04.03.A3	Kapuas	Sebagaimana peta Lampiran V.80	Kalimantan Barat
18	04.07.A3	Mentaya-Katingan	Mentaya dan Katingan	Kalimantan Tengah
19	05.01.A3	Tondano-Sangihe-Talau-Miangas	Sebagaimana peta Lampiran V.95	Sulawesi Utara
20	05.05.A3	Paguyaman	Sebagaimana peta Lampiran V.99	Gorontalo
21	05.16.A3	Walanae-Cenranae	Sebagaimana peta Lampiran V.110	Sulawesi Selatan
22	05.17.A3	Jeneberang	Sebagaimana peta Lampiran V.111	Sulawesi Selatan
23	06.01.A3	Halmahera Utara	Sebagaimana peta Lampiran V.117	Maluku Utara
24	06.02.A3	Halmahera Selatan	Sebagaimana peta Lampiran V.118	Maluku Utara
25	06.05.A3	Ambon-Seram	Sebagaimana peta Lampiran V.121	Maluku
26	06.07.A3	Kepulauan Yamdena-Wetar	Sebagaimana peta Lampiran V.123	Maluku

Keterangan:

* : Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut dengan tetap menjamin kebutuhan air baku Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1.4 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
1	01.02.B	Teunom-Lambeuso	Sebagaimana peta Lampiran V.2	Aceh
2	01.03.B	Pase-Peusangan	Pandrah, Nalon, Peudada, Ihong, Peusangan, Tuam, Buluh, Pase, Penggaraman, dan Bukit	Aceh
3	01.06.B	Tamiang-Langsa	Sebagaimana peta Lampiran V.6	Aceh
4	01.07.B	Baru-Kluet	Sebagaimana peta Lampiran V.7	Aceh
5	01.10.B	Wampu-Besitang	Sebagaimana peta Lampiran V.10	Sumatera Utara
6	01.12.B	Bah Bolon	Sipare-pare, Bolon, Perupuk, Kiri, dan Silau Bonto	Sumatera Utara
7	01.14.B	Nias	Sebagaimana peta Lampiran V.14)	Sumatera Utara
8	01.15.B	Sibundong-Batang Toru	Sebagaimana peta Lampiran V.15	Sumatera Utara
9	01.16.B	Barumun-Kualuh	Panai dan Aek Barumun	Sumatera Utara
10	01.17.B	Batang Angkola-Batang Gadis	Toru, Nagor, Batang Singkuang, Batang Gadis, dan Tabuyung	Sumatera Utara
11	01.19.B	Masang-Pasaman	Bangis, Sikilang, Maligi, Pasaman, Ampu, Simpang, Palembang, dan Masang	Sumatera Barat
12	01.21.B	Silaut-Tarusan	Sebagaimana peta Lampiran V.21	Sumatera Barat
13	01.30.B	Reteh	Apung	Riau

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
14	01.31.B	Bengkalis-Meranti	Sebagaimana peta Lampiran V.31	Riau
15	01.33.B	Pengabuan-Lagan	Pengabuan, Betara, Pangkal Duri, Mandahara, dan Lagan	Jambi
16	01.36.B	Sebelat-Ketahun-Lais	Sebagaimana peta Lampiran V.36	Bengkulu
17	01.37.B	Bengkulu-Alas-Talo	Bengkulu, Jenggalu, Nelas, Kungkai, Seluma, Penago, Talo, Alas, dan Maras	Bengkulu
18	01.42.B	Belitung	Sebagaimana peta Lampiran V.42	Bangka Belitung
19	01.44.B	Semangka	Sebagaimana peta Lampiran V.44	Lampung
20	02.01.B	Cibaliung-Cisawarna	Sebagaimana peta Lampiran V.46	Banten
21	02.02.B	Ciliman-Cibungur	Sebagaimana peta Lampiran V.47	Banten
22	02.05.B	Cisadea-Cibareno	Sebagaimana peta Lampiran V.52	Jawa Barat
23	02.06.B	Ciwulan-Cilaki	Sebagaimana peta Lampiran V.53	Jawa Barat
24	02.09.B	Pemali-Comal	Sebagaimana peta Lampiran V.56	Jawa Tengah
25	02.11.B	Bodri-Kuto	Sebagaimana peta Lampiran V.58	Jawa Tengah
26	02.18.B	Madura-Bawean	Sebagaimana peta Lampiran V.65	Jawa Timur
27	02.19.B	Welang-Rejoso	Sebagaimana peta Lampiran V.66	Jawa Timur
28	02.20.B	Bondoyudo-Bedadung	Sebagaimana peta Lampiran V.67	Jawa Timur
29	02.21.B	Pekalen-Sampean	Sebagaimana peta Lampiran V.68	Jawa Timur

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
30	02.22.B	Baru-Bajulmati	Sebagaimana peta Lampiran V.69	Jawa Timur
31	03.04.B	Sumba	Sebagaimana peta Lampiran V.73	Nusa Tenggara Timur
32	03.06.B	Flotim Kep-Lembata-Alor	Sebagaimana peta Lampiran V.75	Nusa Tenggara Timur
33	04.01.B	Sambas	Polah, Sambas, Sebangkau, dan Selakau	Kalimantan Barat
34	04.02.B	Mempawah	Raya, Duri, Mempawah, Karimunting, dan Lemukutan	Kalimantan Barat
35	04.04.B	Pawan	Semadang, Semanai, Siduk, Tolak, Pawan, dan Pesaguan	Kalimantan Barat
36	04.06.B	Seruyan	Perlu, Segintung, dan Seruyan	Kalimantan Tengah
37	04.08.B	Kahayan	Sebangan dan Kahayan	Kalimantan Tengah
38	04.10.B	Cengal-Batulicin	Sebagaimana peta Lampiran V.87	Kalimantan Selatan
39	04.14.B	Karangan	Sebagaimana peta Lampiran V.91	Kalimantan Timur
40	04.16.B	Kayan	Kayan	Kalimantan Utara
41	05.02.B	Poigar-Ranoyapo	Sebagaimana peta Lampiran V.96	Sulawesi Utara
42	05.07.B	Lambunu-Buol	Sebagaimana peta Lampiran V.101	Sulawesi Tengah
43	05.10.B	Bongka-Mentawa	Sebagaimana peta Lampiran V.104	Sulawesi Tengah
44	05.11.B	Kepulauan Banggai	Sebagaimana peta Lampiran V.105	Sulawesi Tengah
45	05.12.B	Laa-Tambalako	Sebagaimana peta Lampiran V.106	Sulawesi Tengah

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi
46	05.20.B	Poleang-Roraya	Sebagaimana peta Lampiran V.114	Sulawesi Tenggara
47	05.21.B	Muna	Sebagaimana peta Lampiran V.115	Sulawesi Tenggara
48	05.22.B	Buton	Sebagaimana peta Lampiran V.116	Sulawesi Tenggara
49	06.03.B	Kepulauan Sula-Obi	Sebagaimana peta Lampiran V.119	Maluku Utara
50	06.04.B	Buru	Sebagaimana peta Lampiran V.120	Maluku
51	06.06.B	Kepulauan Kei-Aru	Sebagaimana peta Lampiran V.122	Maluku
52	07.01.B	Kamundan-Sebyar	Sebagaimana peta Lampiran V.124	Papua Barat
53	07.03.B	Wapoga-Mimika	Sebagaimana peta Lampiran V.126	Papua

Tabel 1.5 Wilayah Sungai Dalam Satu Kabupaten/Kota

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	01.08.C	Simeulue	Sebagaimana peta Lampiran V.8	Aceh	Simeuleu
2	01.20.C	Siberut-Pagai-Sipora	Sebagaimana peta Lampiran V.20	Sumatera Barat	Mentawai
3	01.22.C	Kubu	Paripahan, Pasir Limau Kapas, Pasir Limau, Sungai Daun, Teluk Piayai, Kubu, Bangko, dan Alang Besar	Riau	Rokan Hilir
4	01.24.C	Bukit Batu	Sepahat dan Bukit Batu	Riau	Bengkalis
5	01.26.C	Rawa	Rawa, Metas, Mungkal, Belat, Lakar, dan Kimas	Riau	Siak
6	01.28.C	Guntung-Kateman	Danai, Kateman, Burung, dan Busung	Riau	Indragiri Hilir
7	01.38.C	Enggano	Mae, Tanjung Kooma, Tanjung Lakoaha, Mahame, Kokodo, Malakoni, Belowa, Kijah, Taobi, dan Dua	Bengkulu	Bengkulu Utara
8	02.04.C *	Kepulauan Seribu	Sebagaimana peta Lampiran V.49	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu
9	02.12.C	Kepulauan Karimunjawa	Sebagaimana peta Lampiran V.59	Jawa Tengah	Jejepara
10	02.13.C	Wiso-Gelis	Sebagaimana peta Lampiran V.60	Jawa Tengah	Jejepara
11	04.12.C	Pulau Laut	Sebagaimana peta Lampiran V.88	Kalimantan Selatan	Kota Baru

No.	Kode WS	Nama Wilayah Sungai	Nama-nama Daerah Aliran Sungai (DAS)	Provinsi	Kabupaten/Kota
12	04.12.C	Kendilo	Sebagaimana peta Lampiran V.89	Kalimantan Timur	Paser

Keterangan:

* : Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administrasi yang dikelola oleh Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai tersebut menjadi Kewenangan Prov. DKI Jakarta

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

M. BASUKI HADIMULJONO